



**PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE  
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

**Intan Rahayu, R.Budi Hendaris**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana Penerapan Good Government Governance pada Kabupaten Bandung Barat, (2) Bagaimana Pengawasan Internal pada Kabupaten Bandung Barat, (3) Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bandung Barat, dan (4) Apakah Good Government Governance dan Pengawasan Internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Nonprobability sampling dengan teknik sampel jenuh. Total responden yang diterima sebanyak 94 responden dari 47 SKPD. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Good Government Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, (2) Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dan (3) Good Government Governance dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Good Government Governance, Pengawasan Internal, Kinerja Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN

Pada era reformasi saat ini, akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang semakin pesat, khususnya dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan otonomi dan perhatian kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat dengan berkontribusi pada peningkatan partisipasi, pemberdayaan, pelayanan masyarakat serta berperan dalam menumbuhkan daya saing dengan mempertimbangkan asas demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, keragaman dan potensi di setiap daerah yang lebih baik (Fauzi, 2017, hlm. 64).

*Good governance* merupakan konsep otonomi daerah untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bersih. Dalam menyelenggarakan *good governance* maka wajib diseimbangkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik. Konsep mengenai *good governance* memiliki cakupan luas dan sering didefinisikan dalam konteks yang berbeda. Pada konteks pemberantasan KKN, *good governance* dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang bebas dari praktik KKN, namun sebagian kalangan mendefinisikan *good governance* sebagai gambaran akurat tentang demokrasi yang membutuhkan budaya kewarganegaraan untuk menjaga kelangsungan demokrasi (Rochmansjah, 2019, hlm. 1).

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan *Good Government Governance* adalah dengan cara menerapkan pengawasan internal sebagai fungsi manajerial dalam mengelola pemerintahan. Semakin baik pengawasan internal yang dijalankan, maka semakin efektif kinerja pemerintah. Pengawasan internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan kejadian potensial diluar rencana. Pengawasan internal juga

digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian dari suatu aktivitas, meningkatkan keandalan laporan keuangan dan mendorong ketaatan peraturan dan hukum (Jatmiko, 2020, hlm. 234). Namun, apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan maksimal selama implementasi dapat dipastikan terdapat kemungkinan penyalahgunaan dan penyimpangan kekuasaan (Wahyu Aji & Pratolo, 2018, hlm. 157).

Besarnya asumsi masyarakat mengenai pelaksanaan kinerja pemerintah daerah memperoleh perhatian publik. Pemerintah wajib merespon tuntutan publik terhadap pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan *good governance* dengan menjalankan berbagai perubahan yang mengarah kepada terwujudnya implementasi pemerintah yang baik. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan baik, hal tersebut terjadi di hampir seluruh instansi pemerintah. Kinerja ialah perkiraan atas implementasi suatu aktivitas dalam mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran instansi yang dituangkan dalam rencana strategi (Basri et al., 2021, hlm. 126). Untuk saat ini, kinerja pemerintahan dalam mengelola pemerintahan serta keuangan belum memenuhi harapan publik

Berikut ini merupakan data hasil opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada periode 2016-2020 sebagaimana yang terdapat pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Opini Audit Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung**  
**Barat**

| Tahun | Opini Audit | Keterangan                 |
|-------|-------------|----------------------------|
| 2016  | WDP         | Wajar Dengan Pengecualian  |
| 2017  | WDP         | Wajar Dengan Pengecualian  |
| 2018  | WDP         | Wajar Dengan Pengecualian  |
| 2019  | WTP         | Wajar Tanpa Pengecualian   |
| 2020  | WDP         | Wajar Dengan Pengecualiaan |

Sumber : BPK Perwakilan Jawa Barat (2021)

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada hasil laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) secara berturut-turut dan Mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun periode 2019.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dengan penemuan diantaranya kelebihan pembayaran belanja modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp.3.417.458.485,11 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima koma sebelas rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Belanja tidak terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengamanan Sosial dan Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan dan Akumulasi

Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Laporan hasil audit yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya mengimplementasi prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, efisien dan efektif, akuntabilitas, daya tanggap, berorientasi konsensus dan visi strategis (Mardiasmo, 2018, hlm. 23). Selain itu, dalam pengawasan internal pada Kabupaten Bandung Barat belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Pencapaian *Good Government Governance* tidak hanya diukur dari kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, tetapi juga membutuhkan pengawasan internal yang baik untuk melaksanakan setiap program pemerintah agar dapat dengan baik guna membangun tata kelola yang baik.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Teori keagenan adalah sejenis jaringan keagenan seperti perjanjian yang memungkinkan satu atau lebih *principal* menyewa agen untuk membuat penawaran, kesepakatan serta menlimpahkan wewenang untuk pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Tujuan dari teori tersebut yaitu untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pulik dari sumber daya yang tepat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta berhubungan dengan praktek pelaporan kinerja (Damayanti & Hermanto, 2018, hlm. 3).

### **Teori Stewardship**

Teori *Stewardship* merupakan keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih memperhatikan kebutuhan publik atau tujuan instansi daripada kehendak pribadinya (Jatmiko, 2020, hlm. 233). Secara teori terdapat korelasi yang kuat antara pencapaian dengan kepuasan sebuah instansi.

Teori *stewardship* menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hubungan perjanjian dengan organisasinya mewakili komitmen moral dan menimbang bahwa dua belah pihak untuk bekerja menuju tujuan bersama tanpa saling memanfaatkan (Saputro, 2019, hl. 3).

### **Good Governmnet Governance**

*Good governance* didefinisikan sebagai metode pengelola sumber daya baik secara ekonomi maupun sosial disuatu negara untuk pengembangan masyarakat, sedangkan dalam United Nation Development Program (UNDP), *good governance* merupakan pelaksana urusan ekonomi, administratif dan politik dalam menyelenggarakan urusan negara pada semua tingkat (Mardiasmo, 2018, hlm. 23).

### **Pengawasan internal**

Pengawasan internal merupakan aparat pengawas yang melaksanakan pengawasan di lingkungan internal suatu instansi pemerintah. Pengawasan internal pada pemerintahan digunakan untuk menciptakan hasil dan tujuan, mewujudkan laporan keuangan yang andal, mentaati hukum dan peraturan yang ditetapkan, serta berperan dalam mencegah terjadinya kerugian sumber daya (Sari, 2021, hlm.3). Sedangkan pengertian lain mengenai pengendalian internal merupakan sarana untuk mengarahkan, memantau, mengevaluasi sumber daya, serta berperan dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan (Hendaris & Romli, 2021, hlm. 572).

### **Kinerja pemerintah**

Kinerja pemerintah merupakan ukuran keberhasilan individu maupun organisasi yang dapat dilihat dan diukur secara realitas, dengan kata lain pegawai pemerintah memiliki peran penting dalam organisasi (Mattoasi dkk., 2021, hlm. 103).

Menurut (Halim, 2019, hlm. 85) Indikator kerja dapat didefinisikan sebagai indikator kualitatif dan kuantitatif yang mengilustrasikan tingkat pencapaian tujuan maupun saran yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator diantaranya:

1. Masukan
2. Keluaran
3. Hasil
4. Manfaat
5. Dampak

### **Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis adalah pertanyaan yang mengilustrasikan sebuah relasi tiap variabel yang berkaitan dengan penelitian terpilih serta merupakan asumsi sementara yang perlu diuji kebenarannya.

H<sub>1</sub> : *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H<sub>2</sub> : Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H<sub>3</sub> : *Good Government Governance* dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, bersifat kualitatif yang diubah menjadi kuantitatif sebab data penelitian yang disajikan dalam bentuk angka dengan pendekatan analisis statistik. Pemilihan pendekatan menggunakan metode deskriptif dan asosiatif maksud dari pendekatan ini adalah untuk menghimpun data dan diamati secara mendalam perihal aspek

tertentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Menurut (Sugiyono, 2019, hlm.126) populasi merupakan semua poin yang hendak dijadikan wilayah penyamarataan. Populasi yang digunakan sebesar 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat, adapun sampel yang digunakan merupakan seluruh populasi yang dijadikan sampel dimana diambil sebanyak 2 responden pada setiap bagian SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan teknik sampling yang diambil merupakan teknik *Non-Probability Sampling* dimana berdasarkan pernyataan (Sugiyono, 2019, hlm. 131) *Non-probability sampling* ialah suatu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang sama sekali tidak memberikan peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel memakai metode sampel jenuh menurut (Sugiyono, 2019, hlm. 133) sampel jenuh ialah suatu sampel yang dimana jika sampel tersebut ditambah jumlahnya maka sama sekali tidak akan berpengaruh kepada nilai informasi yang diperoleh.

Jenis data yang digunakan ialah jenis kuantitatif, yaitu dimana data tersebut berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sifat data berupa *cross section* dan merupakan salah satu jenis data kuantitatif yang dimana data tersebut dihimpun dari objek yang sama atau berbeda dalam jangka waktu yang tidak sama (Sugiyono, 2019, hlm. 9).

Sedangkan sumber data yang dipakai merupakan sumber data primer dan data sekunder dimana data primer merupakan data yang diterima secara langsung tanpa adanya perantara lain serta data sekunder merupakan data yang dimiliki sebagai hasil penelitian dari pihak lain. Data primer didapatkan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner atau angket.

Pada teknik pengumpulan data dipilih metode kuesioner yang berisi berbagai pertanyaan berhubungan dengan variabel yang diteliti. Jenis kuesioner yang dipilih merupakan jenis kuesioner tertutup dengan tujuan memberi kemudahan kepada responden dalam menjawab. Kuesioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung kepada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta data sekunder yang digunakan untuk pelengkap dari data primer. Pertanyaan pada kuesioner diberikan kepada responden agar mendapatkan informasi mengenai variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, responden mengisi kuesioner dengan men-*checklist* pilihan jawaban yang telah disediakan, untuk setiap poin jawaban mempunyai bobot nilai berdasarkan jawaban. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal yang diubah menjadi skala interval dengan bantuan *Method successive of interval* (MSI). Skala pengukuran instrumen sebagai penilaian setiap poin kuesioner menggunakan teknik skala likert.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menentukan apakah data yang diteliti dapat menjamin mutu hingga alasan yang dipaparkan terkait korelasi setiap variabel dapat diterima dan dipercaya adalah dengan dilakukannya pengujian kualitas. Alat ukur yang digunakan diantaranya uji validitas dan uji reliabilitas.

### **Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya.

#### **1. Variabel *Good Government Governance* (X1)**

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian validitas yang terdiri dari 18 pertanyaan pada variabel *Good*

Government Governance (X<sub>1</sub>) pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengujian Validitas Good Government Governance**

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| x1.1       | 0,474    | 0,3     | valid      |
| x1.2       | 0,460    | 0,3     | valid      |
| x1.3       | 0,555    | 0,3     | valid      |
| x1.4       | 0,583    | 0,3     | valid      |
| x1.5       | 0,394    | 0,3     | valid      |
| x1.6       | 0,477    | 0,3     | valid      |
| x1.7       | 0,653    | 0,3     | valid      |
| x1.8       | 0,350    | 0,3     | valid      |
| x1.9       | 0,459    | 0,3     | valid      |
| x1.10      | 0,416    | 0,3     | valid      |
| x1.11      | 0,498    | 0,3     | valid      |
| x1.12      | 0,498    | 0,3     | valid      |
| x1.13      | 0,508    | 0,3     | valid      |
| x1.14      | 0,420    | 0,3     | valid      |
| x1.15      | 0,429    | 0,3     | valid      |
| x1.16      | 0,62     | 0,3     | valid      |
| x1.17      | 0,332    | 0,3     | valid      |
| x1.18      | 0,477    | 0,3     | valid      |

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pertanyaan dari variabel *Good Government Governance* (X<sub>1</sub>) dapat disimpulkan bahwa dari 18 (delapan belas) butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid, karena r<sub>hitung</sub> lebih besar dari 0,3.

### 2. Variabel Pengawasan Internal (X<sub>2</sub>)

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian validitas yang terdiri dari 16 butir pertanyaan pada variabel Pengawasan Internal (X<sub>2</sub>) pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengujian Validitas Pengawasan Internal**

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| X2.1       | 0,532    | 0,3     | valid      |
| X2.2       | 0,393    | 0,3     | valid      |
| X2.3       | 0,524    | 0,3     | valid      |
| X2.4       | 0,483    | 0,3     | valid      |
| X2.5       | 0,437    | 0,3     | valid      |
| X2.6       | 0,476    | 0,3     | valid      |
| X2.7       | 0,364    | 0,3     | valid      |
| X2.8       | 0,442    | 0,3     | valid      |
| X2.9       | 0,552    | 0,3     | valid      |
| X2.10      | 0,711    | 0,3     | valid      |
| X2.11      | 0,581    | 0,3     | valid      |
| X2.12      | 0,621    | 0,3     | valid      |
| X2.13      | 0,660    | 0,3     | valid      |
| X2.14      | 0,448    | 0,3     | valid      |
| X2.15      | 0,534    | 0,3     | valid      |
| X2.16      | 0,576    | 0,3     | valid      |

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pertanyaan dari variabel Pengawasan Internal (X<sub>2</sub>) dapat disimpulkan bahwa dari 16 (enam belas) butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid, karena r<sub>hitung</sub> lebih besar dari 0,3.

### 3. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian validitas yang terdiri dari 10 butir pertanyaan pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pada tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengujian Validitas Kinerja Pemerintah Daerah**

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| y1         | 0,563    | 0,3     | valid      |
| y2         | 0,641    | 0,3     | valid      |
| y3         | 0,470    | 0,3     | valid      |
| y4         | 0,702    | 0,3     | valid      |
| y5         | 0,602    | 0,3     | valid      |
| y6         | 0,713    | 0,3     | valid      |
| y7         | 0,670    | 0,3     | valid      |
| y8         | 0,609    | 0,3     | valid      |
| y9         | 0,702    | 0,3     | valid      |
| y10        | 0,591    | 0,3     | valid      |

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pertanyaan dari variabel kinerja pemerintah daerah (Y) dapat diambil kesimpulan bahwa dari 10 (sepuluh) butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid, karena  $r_{hitung}$  lebih besar dari 0,3.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah alat pengumpulan data memperlihatkan tingkat ketepatan, akurasi, stabilitas atau konsistensi ketika memaparkan gejala tertentu. Uji reliabilitas menggunakan pengujian dengan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan aplikasi SPSS 25.

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel *Good Government Governance* (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Ujian Reliabilitas**

| Keterangan                        | Cronbach's Alpha | N of Items |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| <i>Good Government Governance</i> | 0,784            | 18         |
| Pengawasan Internal               | 0,799            | 16         |
| Kinerja Pemerintah Daerah         | 0,824            | 10         |

Sumber:diolah peneliti

Berdasarkan hasil dari pengujian reliabilitas untuk *Good Government Governance* (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70.

**Analisis Regresi Berganda**

Regresi linear berganda yaitu metode statistik yang digunakan untuk meneliti keterkaitan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda untuk variabel *Good Government Governance* (X1), Pengawasan Internal

(X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

| Model                               | B     | Std. Error | Beta  | t     | Sig.  |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| (Constant)                          | 3,369 | 3,288      |       | 1,024 | 0,308 |
| 1 <i>Good Government Governance</i> | 0,3   | 0,079      | 0,415 | 3,801 | 0     |
| Pengawasan Internal                 | 0,227 | 0,081      | 0,305 | 2,793 | 0,006 |

Sumber: diolah peneliti

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai a adalah sebesar 3,369 dimana hal tersebut merupakan keadaan pada saat variabel belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel *Good Government Governance* dan Pengawasan Internal. Namun, jika variabel independen tidak ada maka variabel dependen tidak mengalami perubahan.

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

$$Y = 3,369 + 0,300.X_1 + 0,227.X_2 + 0,05$$

*Good Government Governance* (X1) sebesar 0,30 dan Pengawasan Internal (X2) sebesar 0,227 hal ini menunjukkan bahwa variabel *Good Government Governance* (X1) dan Pengawasan Internal (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) artinya setiap kenaikan satu satuan variabel *Good Government Governance* (X1) dan Pengawasan Internal (X2) maka akan mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,3 untuk *Good Government Governance* (X1) dan 0,227 untuk Pengawasan Internal (X2) dengan asumsi bahwa tidak adanya variabel lain yang diteliti.

**Analisis Korelasi Determinan**

Menurut (Ghozali, 2018; hlm. 97) pengertian dari Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan

pengukuran yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan nilai R<sup>2</sup> yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan setiap variabel independen dalam mendefinisikan variabel dependen mempunyai terbatas.

Hasil analisis korelasi determinan untuk variabel *Good Government Governance* (X<sub>1</sub>), Pengawasan Internal (X<sub>2</sub>) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) berdasarkan tabel 3.6 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Hasil Korelasi Determinan**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,664 <sup>a</sup> | ,441     | ,429              | 4,02775                    |

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan hasil korelasi determinan ini menunjukkan adanya pengaruh nilai koefisien R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,441 atau 44,1% jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh *Good Government Governance* dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,441 atau 44,1%.

**Uji Parsial (Uji Statistik T)**

Uji Parsial dilakukan dengan tujuan untuk melihat signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji dengan uji-t satu. Hasil uji parsial untuk variabel *Good Government Governance* (X<sub>1</sub>), terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.7:

**Tabel 3.7**  
**Hasil Uji Parsial *Good Government Governance***

| Model                             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)                      | 7,264                       | 3,086      |                           | 2,353 | ,021 |
| <i>Good Government Governance</i> | ,453                        | ,059       | ,627                      | 7,722 | ,000 |

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = (a/2 : n-k-1)$  dimana a adalah 5% dan untuk mencari  $t_{tabel}$  menggunakan perhitungan  $(0,05/2 : 94-2-1)$  dimana 0,025 : 91 maka hasil t tabel adalah 1,98638. Nilai signifikan pada uji parsial menunjukkan bahwa  $0,000 < 0,05$ . Selain itu  $t_{hitung} 7,722 > 1,98638$   $t_{tabel}$  dapat disimpulkan bahwa hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 7,722 >$  nilai  $t_{tabel} 1,98638$  artinya terdapat pengaruh positif *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah secara signifikan dimana semakin baik implementasi *Good Government Governance* maka Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat juga semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahadi dkk., 2020, hlm. 5), (Gustianra & Serly, 2019, hlm.1440) dan (Rahman & Rachman, 2021, hlm. 30) mengungkapkan bahwa *government governance* berpengaruh positif signifikan pada kinerja pemerintah.

Hasil uji parsial untuk variabel Pengawasan Internal (X<sub>2</sub>) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) terdapat pada tabel 3.8:

**Tabel 3.8**  
**Hasil Uji Parsial Pengawasan Internal**

| Model               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                     | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)        | 7,728                       | 3,300      |                           | 2,342 | ,021 |
| Pengawasan Internal | ,443                        | ,063       | ,594                      | 7,076 | ,000 |



Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan bahwa rumus  $t_{tabel}$  adalah  $(\alpha/2 ; n-k-1)$  dimana  $\alpha$  adalah 5% dan untuk mencari  $t_{tabel}$  menggunakan perhitungan  $(0,05/2 ; 94-2-1)$  dimana  $0,025 : 91$  maka hasil  $t_{tabel}$  adalah 1,98638. Nilai signifikan pada uji parsial menunjukkan bahwa  $0,000 > 0,05$   $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  7,076 lebih besar dari 1,98638 dapat disimpulkan bahwa hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  $0,000 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  7,076 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,98638 yang berarti terdapat pengaruh positif pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah secara signifikan yang dimana semakin baik Pengawasan Internal maka Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat juga akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) bahwa Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Pengujian yang dilakukan secara berdampingan guna untuk melihat apakah variabel bebas secara berdampingan memiliki pengaruh terhadap variabel. Hasil uji simultan untuk variabel *Good Government Governance* ( $X_1$ ) dan Pengawasan Internal ( $X_2$ ) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ( $Y$ ) terdapat pada tabel 3.9:

**Tabel 3.9**  
**Hasil Uji Simultan**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 1165,572       | 2  | 582,786     | 35,924 | ,000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 1476,270       | 91 | 16,223      |        |                   |
|       | Total      | 2641,842       | 93 |             |        |                   |

Sumber: diolah peneliti

Hasil uji simultan memperlihatkan nilai signif.  $0,000 < 0,05$  dan Nilai  $f_{hitung}$  35,924  $> 3,10 f_{tabel}$  dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi untuk *Good Government Governance* dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara *good government governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah secara signifikan dimana semakin baik *Good Government Governance* dan Pengawasan Internal maka Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021, hlm. 20) mengungkapkan bahwa *good governance* dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah Kota Surabaya.

**SIMPULAN**

1. *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. *Good Government Governance* dan Pengawasan Internal secara bersama-sama, berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111-130. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>

Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). Implementation of Good Governance To Improve the Performance of Village Governments. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123-136. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>

- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Da*, 7(3), 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/97>
- Fauzi, A. (2017). Peran Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(0854), 64–75. <https://doi.org/0854-2031>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426–1442. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.152>
- Halim, A. S. M. K. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (A. S. M. K. Halim (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and Implications on Quality Village Financial Report. *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(4), 569–580. <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i4.784>
- Indonesia, Ib. P. R. (2021). *No Title*. <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Lastiar, Febrina; Widyaningsih, A. (2019). Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426–1442. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.152>
- Lestari, U. P., & Mutoriogh. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Trasparansi, Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53.
- Lintong, D. N., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. *Accountability*, 6(1), 118. <https://doi.org/10.32400/ja.16034.6.1.2017.118-127>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Terbaru). CV. ANDI OFFSET.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Murniati, S. (2020). Pengaruh Pengawasan, Sistem Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *AkMen*, 17(Desember), 110–122. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154>
- Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Equilibrium*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.330>
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut). *Polban*, 1299–1311. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1430-Article Text-2812-1-10-20190830.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1430-Article%20Text-2812-1-10-20190830.pdf) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pitaloka, J. J., & Handayani, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada OPD Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1–20.
- Rahadi, D. R., Marbun, S. O., Bhakti, S. T., Presiden, U., & Mochamadmuslihstietrihaktiacid, E. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Adminstrasi*, February, 1–7.

Rahma, Dea Novitasari; Jatmiko, T. W. P. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–8.

Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Equilibrium*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/eq.v2i1.510>

Rochmansjah, H. (2019). Application of Good Governance Principles in Government: Perspective of Public Services. *International Journal of Science and Society*, 1(4), 1–8. <http://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/140>

Salamah, Nurhani; Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2020). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)*.

Saputro, G. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.

Sari, H. D. D. (2021). Pengaruh Good Governance , Komitmen Organisasi dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja OPD : Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–25. <https://doi.org/2460-0585>

Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 503–514. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6256>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.

Sunarmo, A. S., Widianingsih, R. W., Pratiwi, U. P., & Hidayat, T. H. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 9–18. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1>.

2126

Wahyu Aji, T. S., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 153–170. <https://doi.org/10.18196/rab.020229>